

## **PENGEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN. (2008)**

### **Abstrak**

Era desentralisasi memberi peluang luas terhadap daerah ataupun sekolah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Hak otonom diterapkan sampai ke tingkat kelas dan diatur oleh guru serta tenaga kependidikan lainnya. Bahkan jika diperlukan dapat direncanakan kemanafaatannya dalam masyarakat dan keluarga. Karena desentralisasi pendidikan masih merupakan kebijakan yang baru, serta kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam memberi arah hasil pendidikan, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk memberi jalan keluar kepada sekolah atau Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan kurikulum terutama kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.

Kegiatan pengembangan kurikulum tidak akan lepas dengan perencanaan kurikulum. Adapun prinsip-prinsip dasar proses perencanaan dan pengembangan kurikulum yang penting antara lain : fokus upaya perencanaan kurikulum bagi siswa dan pengalaman belajar yang melibatkan berbagai pihak, mengkaji berbagai aspek dan persoalan, perencanaan dan pengembangan kurikulum harus dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Untuk mempersiapkan kurikulum yang mantap perlu perencanaan mulai dari tingkat makro (nasional) sampai ke tingkat mikro (interaksi guru-murid di sekolahnya). Informasi harus dikumpulkan menyangkut aspek demografis, aspek sosiologis dan aspek ekonomis. Demikian pula untuk menyusun urutan dan struktur kurikulum diperlukan bantuan para ahli psikologi belajar, para pakar bidang studi yang mumpuni, para ahli pendidikan. Dalam fase evaluasi melibatkan pihak masyarakat luas seperti pemakai lulusan, para lulusan sendiri dan para pelaksana seperti guru dan administrator. Terdapat beberapa alternatif penentuan isi kurikulum pendidikan teknologi kejuruan yakni menggunakan beberapa pendekatan seperti: pendekatan filosofis, pendekatan introspektif, pendekatan DACUM, pendekatan fungsional serta pendekatan job analisis).

### **Kata Kunci : Pengembangan Kurikulum**

#### **A. Pendahuluan**

Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” Pada tanggal 2 Mei 2002. Hal ini merupakan momentum yang paling tepat dalam rangka mengantisipasi era kesejagatan, khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan negara-negara ASEAN, seperti AFTA (*Asean Free Trade Area*), dan AFLA (*Asean Free Labour Area*), maupun di kawasan negara-negara Asia Pasifik (APEC).

Dalam era globalisasi dan pasar bebas, manusia dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak menentu. Ibarat nelayan di “lautan lepas” dapat sesat jika tidak memiliki “kompas” sebagai pedoman dalam mengarunginya. Hal tersebut telah mengakibatkan hubungan yang tidak linear antara pendidikan dengan lapangan kerja atau “*one to one relationship*”, karena apa yang terjadi dalam lapangan kerja sulit diikuti oleh dunia pendidikan. Maka harus diletakkan pada empat pilar yaitu belajar

mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*), dan belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*). Kultur yang demikian harus dikembangkan dalam pembangunan manusia, karena pada akhirnya aspek kultural dari kehidupan manusia lebih penting dari pertumbuhan ekonomi.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah banyaknya siswa SLTP yang amat rentan dengan *droup out* karena kondisi ekonomi yang sulit dan banyak tamatan SLTP yang terpaksa harus menjadi penganggur karena tidak mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga merasa kesulitan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan nyata. Menurut data dari Balitbang Diknas tahun 2000 terdapat 19,3% tamatan SD tidak melanjutkan ke SLTP. 34,4% tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA dan 53,12 tamatan SLTA yang tidak melanjutkan ke PT, sedangkan daya tampung PT sekitar 11,41%, dengan kata lain terdapat 88,6% tamatan SLTA yang harus ke dunia kerja (Bambang Sartono, 2003). Hal yang demikian menuntut dunia pendidikan melakukan introspeksi pada pola pembelajaran yang dikembangkan di sekolah karena selama ini pembelajaran yang dikembangkan di sekolah bersifat teoritis dan kurang menyentuh pada kebutuhan anak untuk bekal hidup di masyarakat dan siswa seakan-akan asing dari lingkungan hidupnya.

Agar bangsa Indonesia dapat mengatasi kondisi akibat krisis yang juga belum berakhir maupun dalam rangka menghadapi persaingan pasar bebas dibutuhkan pengelolaan pendidikan yang dapat membekali pada anak didik yang tangguh.

Masalah di atas masih ditambah lagi dengan fakta bahwa sebagian besar tamatan pendidikan dasar dan menengah umum tidak dapat terserap ke dalam dunia kerja. Faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah: (1) jumlah angkatan kerja yang hanya tamatan pendidikan dasar dan menengah umum jauh lebih besar daripada kesempatan kerja yang ada, (2) angkatan kerja tamatan pendidikan dasar dan menengah umum kalah bersaing dengan angkatan kerja tamatan pendidikan menengah kejuruan dalam memasuki lapangan kerja, karena kecakapan yang mereka miliki sangat minim dan terbatas, (3) kecakapan hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat luas khususnya dunia kerja yang ada di masyarakat tidak sesuai dengan kecakapan yang dimiliki tamatan pendidikan dasar dan menengah umum (Saryono, Djoko, 2002). Hal-hal tersebut menyebabkan para lulusan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif, apalagi keunggulan kompetitif.

Bertolak dari berbagai gambaran di atas, dapat dilihat bahwa ada permasalahan besar dan mendasar dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yaitu rendahnya mutu sistem pembelajaran atau sistem pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan sistem pendidikan yang dalam hal ini pengembangan kurikulum yang mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Era desentralisasi memberi peluang luas terhadap daerah ataupun sekolah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Hak otonomi diterapkan sampai ke tingkat kelas dan diatur oleh guru serta tenaga kependidikan lainnya. Bahkan jika diperlukan dapat direncanakan kemanfaatan masyarakat dan keluarga sebagai mitra dalam pelaksanaan pendidikan. Karena desentralisasi masih merupakan kebijakan yang baru, serta kurikulum merupakan hal sangat penting dalam memberikan arah

hasil pendidikan, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk memberi jalan keluar kepada sekolah atau pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan kurikulum terutama kurikulum sekolah menengah kejuruan.

## **B Desentralisasi Pendidikan**

Istilah desentralisasi memiliki pengertian proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi (Greenberg dan Baron, 1995; Riwukaho, 1996). Melalui desentralisasi, segala keputusan yang dibuat dalam tubuh organisasi didelegasikan kepada bawahan (Daniels dan Spiker, 1994). Tujuan diadakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja pegawai (Greenberg dan Baron, 1995).

Jika diterapkan dalam dunia pendidikan, maka desentralisasi pendidikan merupakan proses pendelegasian wewenang penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, misalnya pemerintah Kotamadya atau Kabupaten. Dengan pelaksanaan desentralisasi di bidang pendidikan ini akan berdampak pada sistem manajemen yang diterapkan di masing-masing daerah otonom. Sebagai salah satu implementasi desentralisasi pendidikan maka dibuatlah manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS.

Menurut Abu Duhou (2002) dan Umaedi (1999), unsur-unsur yang termasuk didesentralisasikan dalam MBS adalah: 1) Pengetahuan (kurikulum, tujuan, dan sasaran pendidikan) 2) Teknologi (mengenai sarana belajar mengajar); 3) Kekuasaan/power (kewenangan dalam pembuatan keputusan) ; 4) material (fasilitas, peralatan sekolah); 5) Manusia (pengembangan profesionalisme yang berkaitan dengan PBM; 6) Waktu (keputusan mengenai alokasi waktu; 7) Keuangan (penggalan, pengelolaan, dan penggunaan uang). Dengan didesentralisasikannya butir-butir tersebut di atas, maka sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pusat (Jakarta), kini beralih ke daerah otonom, yaitu Pemkab dan Pemkot.

Menurut Samani (1999), Umaedi (1999) dan Abu Duhou (2002) kelebihan MBS yang dapat diketengahkan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pendidikan dapat dirancang di sekolah, disesuaikan dengan kondisi lapangan, serta kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dengan demikian, tujuan sekolah dapat dicapai secara efisien dan efektif.
2. Sekolah dapat secara bebas menggali dana masyarakat, serta melakukan kerja sama dengan pihak lain tanpa terikat peraturan-peraturan yang ketat, yang pada masa sebelumnya merupakan kendala. Pihak luar lebih bersedia untuk menggalang kerja sama dengan sekolah, karena terbebas dari campur tangan pemerintah.
3. Sekolah dapat melakukan akuntabilitas secara mantap, yaitu berupa pertanggungjawaban pelaksanaan pendidikan terhadap para penyandang dana, khususnya pada masyarakat dan stake holder.
4. Sekolah dapat dikelola secara unik, sesuai dengan lingkungan sosial sekolah dapat tumbuh sesuai dengan keunikan daerah masing-masing.
4. Sekolah beserta lingkungannya dianggap sebagai suatu unit dalam hal perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen yang mandiri, bukan sekedar pelaksana dari program standar yang dirancang dari atas.

5. Sekolah sebagai unit utama peningkatan mutu pendidikan, diperkirakan akan dapat memberikan kontribusi terhadap seluruh unsur pengelola pendidikan, yaitu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya untuk bertindak lebih profesional.
6. Sekolah, sebagai institusi penyedia layanan jasa pendidikan tidak lagi dapat dipandang sebagai komponen tunggal yang terpisah dari harapan atau aspirasi pelanggan pengguna jasa pendidikan, yaitu masyarakat.
7. Sekolah merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat, sehingga dalam pengelolaan sekolah, unsur masyarakat harus diikutsertakan secara aktif.

Desentralisasi pendidikan berusaha mengurangi campur tangan atau intervensi unit pusat terhadap persoalan-persoalan yang semestinya bila diputuskan dan dilaksanakan oleh unit di daerah. Dengan demikian diharapkan pemberdayaan unit di daerah secara maksimal. Namun, tidak seluruh kewenangan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah. Penetapan bidang atau substansi yang semestinya ditangani daerah inilah yang menjadi faktor kritis, karena terkait dengan berbagai kepentingan yang mesti dikoordinasikan bersama. Thoha (1998) memilih substansi yang masih disentralisasikan antara lain perumusan atau pembuatan kebijakan nasional mengenai pendidikan yang meliputi kurikulum, persyaratan pokok jenjang pendidikan, taksonomi ilmu yang dikembangkan dan diajarkan dalam jenjang pendidikan, persyaratan pembukaan program baru, persyaratan tentang guru pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Sedangkan yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah implementasi dan evaluasi kebijakan nasional, pembuatan kebijakan yang berdimensi daerah atau lokal serta pelaksanaan dan evaluasinya, misalnya memilih tempat berdirinya gedung sekolah, menambah mengangkat guru, memilih dan menetapkan kepala sekolah, mendidik dan mendiklat guru, dan menentukan kurikulum lokal.

Jika menggunakan model "site-base management", yaitu manajemen berbasis tapak atau lokasi setempat, maka strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan pendidikan di bidang anggaran, personalia, dan kurikulum dapat diterapkan (NCREL, 1993).

Untuk memilih substansi yang semestinya di desentralisasikan, perlu di inventarisasikan semua komponen sistem pendidikan nasional, sehingga bisa ditentukan mana yang semestinya secara penuh diserahkan kepada pemerintah daerah, dan mana yang bisa ditangani oleh pusat dan daerah bersama-sama. Komponen sistem pendidikan nasional mencakup tata perundangan / kebijakan, organisasi pendidikan, dana, peserta didik, lingkungan fisik, dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Berdasarkan komponen tersebut, tampaknya komponen sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dana, peserta didik, dan lingkungan fisik dapat sepenuhnya di desentralisasikan, sementara untuk komponen tata peraturan perundangan, organisasi pendidikan, kurikulum, dan kerjasama dengan berbagai pihak merupakan paduan kerjasama antara pusat dan daerah, bergantung pada gradasi substansi yang mesti ditangani. Oleh karena itu, pembagian wewenang kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pendidikan menjadi sangat penting, yang asumsi semacam ini disebut asumsi politik pemerintahan (Tilaar, 1992).

Tilaar (1995) juga menyebutkan tujuan unsur yang merupakan poros penentu perumusan strategi pengelolaan, yaitu : wawasan nusantara dalam wadah negara kesatuan, azas demokrasi, pengembangan kurikulum, proses belajar-mengajar, efisiensi sistem pendidikan, pembiayaan, dan ketenagaan (bandingkan dengan substansi manajemen pendidikan nasional yang telah disebutkan diatas).

Membahas pengelolaan sama dengan membahas manajemen, yang terkait dengan dua konsep yang padu, yaitu manajemen ditinjau dari segi proses dan ditinjau dari segi substansi. Ditinjau dari segi proses, banyak ahli yang mengemukakan tinjauan proses manajemen, misalnya POSDCORB-nya (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgetting) Gullik, atau POAC-nya (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) (Soetopo dan Soemanto, 1985). Jika disimpulkan, proses tersebut pada intinya ada tiga, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol atau evaluasi.

Tinjauan substansi manajemen pendidikan nasional (makro) berbeda dengan substansi manajemen pendidikan yang diterapkan di lembaga pendidikan (mikro). Substansi manajemen pendidikan nasional merupakan komponen yang semestinya ada dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional. Dimensi dan cakupannya lebih luas daripada substansi pendidikan dilembaga pendidikan. Komponen sistem manajemen pendidikan nasional itu mencakup : tata peraturan perundangan, organisasi pendidikan, kurikulum, Sumber Daya Manusia, peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, lingkungan, dana, dan partisipasi masyarakat.

### **C. Pengembangan Kurikulum**

Kebutuhan manusia akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian juga kurikulum di suatu negara pastilah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Merupakan suatu realita bahwa di Indonesia pada setiap kurun waktu satu dekade kurikulum mengalami perubahan atau pergantian. Hal tersebut disebabkan kurikulum yang sudah berlaku dipandang tidak mengasilkan output yang belum berhasil dan memuaskan sesuai dengan tuntutan jaman. Akan tetapi, jika diperhatikan secara cermat sebenarnya yang menyebabkan kurang berhasilnya suatu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang digunakan saja, faktor-faktor lain masih cukup banyak yang turut menentukan keberhasilan dan kualitas pendidikan, seperti guru sebagai pengajar, media yang digunakan dalam pembelajaran, motivasi siswa untuk berprestasi, lingkungan tempat siswa belajar, lingkungan keluarga dan sebagainya. Namun demikian kurikulumlah yang seringkali dipandang sebagai sebab kegagalan pendidikan kita, serta rendahnya kualitas hasil dan prestasi pendidikan kita.

Di Indonesia berdasarkan angka tahun pernah menerapkan berbagai jenis kurikulum yakni Kurikulum 1954, 1961, 1968, 1975, 1984 dan 1994. Untuk yang terakhir yaitu tahun 2004 mulai menerapkan kurikulum berbasis kompetensi.

Kurikulum 1954, 1961, 1968 menerapkan pendekatan materi pelajaran yaitu yang dipentingkan dalam kegiatan belajar mengajar adalah pemberian materi pelajaran sebanyak-banyaknya sehingga siswa memiliki pengetahuan yang banyak

dan memadahi, namun dalam hal keterampilan kurang mendapatkan perhatian. Kurikulum 1975 bertitik tolak dari pendekatan tujuan instruksional, baik umum maupun khusus. Dalam KBM yang penting adalah dicapainya target atau tujuan yang hendak dicapai, sementara materi untuk keperluan pencapaian tujuan pengajaran. Kurikulum 1984 diberlakukan untuk pencapaian tujuan lebih bersifat komprehensif jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yakni meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor sehingga pendidikan mampu memberikan kepada siswa hal-hal yang bersifat praktis-fungsional. Sedangkan kurikulum 1994 diberlakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, yakni berupa tema-tema pembelajaran. Adapun kurikulum 2004 merupakan kurikulum yang di dalamnya memiliki berbagai aspek kompetensi minimal yang seharusnya dimiliki siswa.

Relevan dengan pendapat di atas, prinsip umum implementasi pendidikan kecakapan hidup adalah meliputi: (1) tidak harus atau tidak perlu mengubah bangun – dasar atau sistem pendidikan nasional yang sekarang berlaku; ini mensyaratkan format dan model implementasi pendidikan kecakapan hidup yang fleksibel dan bervariasi, (2) tidak harus atau tidak perlu mengubah kurikulum formal dan ideal (normatif) yang sekarang berlaku, karena kurikulum operasional dapat disiasati sedemikian rupa guna mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup, (3) harus mengedepankan paradigma *learning for life and school to work* yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik; ini berarti membutuhkan suatu kajian kebutuhan-kebutuhan hidup dan kehidupan pada masa depan, (4) harus mengedepankan paradigma *learning from the people* atau kearifan masyarakat setempat yang berkenaan dengan kehidupan mereka; ini memerlukan inventori kemampuan, kemauan, dan pengetahuan masyarakat setempat dalam mempertahankan, menjalani, dan mengembangkan hidup dan kehidupan, (5) harus mengutamakan paradigma pendidikan berbasis komunitas atau pendidikan masyarakat luas (*community based learning* atau *broad based education*).

Adapun prinsip-prinsip dasar proses perencanaan dan pengembangan kurikulum yang penting antara lain :

- a. Perencanaan kurikulum pada hakekatnya adalah upaya untuk membantu anak didik atau dengan kata lain fokus upaya perencanaan kurikulum tidak lain adalah siswa dan pengalaman belajar yang diperolehnya.
- b. Dalam prosesnya perencanaan kurikulum melibatkan banyak pihak yang dilakukan dalam berbagai tingkat atau hierarki vertikal, sesuai dengan jenis dan kuantitas informasi yang terlibat didalamnya.
- c. Karena luasnya dimensi kurikulum sekolah, perencanaan kurikulum harus mengkaji banyak aspek dan persoalan, disamping yang terutama tentang isi dan proses belajar mengajar.
- d. Dengan banyaknya tahapan dan dinamika pendidikan dalam masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan, maka perencanaan dan pengembangan kurikulum harus dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan berjalan terus menerus tanpa mengenal ujung pemberhentian, dan bukan sebagai usaha yang selesai dalam sekali tindakan.

Untuk mempersiapkan suatu kurikulum yang mantap perlu perencanaan mulai dari tingkat makro ( nasional ) sampai ke tingkat mikro ( interaksi guru-murid di sekolahnya ). Informasi harus dikumpulkan menyangkut aspek demografis, aspek sosiologis dan aspek ekonomis. Demikian pula untuk menyusun urutan dan

struktur kurikulum diperlukan bantuan para ahli psikologi belajar, para pakar bidang studi yang mumpuni, para ahli pendidikan. Dalam fase evaluasi, tidak ketinggalan dilibatkan pihak masyarakat luas disamping kelompok spesifik seperti pemakian lulusan, para lulusan sendiri dan para pelaksana seperti guru dan administrator.

#### **D. Implementasi Pengembangan Kurikulum Dalam Desentralisasi Pendidikan.**

Secara umum teori dan model pengembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi dua pendekatan :

- a. Pendekatan deskriptif yang menggunakan deskripsi tentang apa-apa yang dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum seperti penyajian ide atau gagasan dan kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pengembangan suatu konteks lembaga pendidikan.
- b. Pendekatan perspektif yang menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan pada proses perencanaan kurikulum.

Tyler memulai model pengembangan kurikulum dengan identifikasi empat pertanyaan pokok yang harus dicari jawabnya apabila seseorang akan merencanakan suatu kurikulum sekolah.

Pertanyaan tersebut adalah :

- 1) Apakah tujuan pendidikan yang ingin dicapai disekolah ?
- 2) Pengalaman belajar macam apakah yang harus disediakan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut ?
- 3) Bagaimanakah pengalaman-pengalaman belajar tersebut dapat diorganisasi dengan efektif ?
- 4) Bagaimanakah caranya untuk mengetahui bahwa tujuan pendidikan tersebut telah dicapai ?

#### **E. Penentuan Isi Kurikulum Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan**

##### **a. Pendekatan filosofis**

Penentuan isi kurikulum yang mendasarkan pada pemikiran, para ahli filsafat atau pandangan seseorang atau sekelompok orang yang terpandang sebagai sumber inspirasi untuk menentukan misi system pendidikan dan perencanaan isi kurikulumnya. Kelemahan disini adalah sulitnya menemukan konsensus atau kesepakatan para ahli atau para perencana kurikulum tentang pemikiran-pemikiran mereka yang berkenaan dengan apa yang seharusnya diajarkan disekolah kejuruan ?

##### **b. Pendekatan instropektif**

Dengan pemikiran kelompok yang difokuskan pada pemikiran dan perasaan dari mereka yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan PTK misalnya para guru dan administrator yang sehari-hari bekerja dilingkungan sekolah kejuruan. Mereka secara sendiri atau bersama merenungkan kembali apa yang sebaiknya untuk dimasukkan sebagai isi kurikulum sekolah dengan pertimbangan pengalaman, dan informasi yang langsung dapat mereka kumpulkan dan diolah sesuai dengan kontek ini dimana mereka bekerja.

##### **c. Pendekatan Dacum ( Developing A Curikulum )**

Menggunakan gagasan persis seperti pendekatan instropektif, tetapi disini para ahli yang diminta untuk memikirkan kurikulum didatangkan khusus dari para pengusaha atau pekerja dari insdustri dan dunia usaha dengan tanpa melibatkan personel sekolah. Urutan proses secara garis besar adalah sebagai berikut :

- 1) Orientasi bagi anggota komisi atau peserta tentang program yang akan direncanakan kurikulumnya dan apa yang diharapkan dari mereka.
- 2) Mengkaji / mereview deskripsi pekerja dan tugas atau tanggung jawab pekerja tersebut dalam situasi tempat kerja yang riil.
- 3) Mengidentivikasikan kategorisasi kompetensi umum dalam bidang kerja yang dimaksud, yang biasanya merupakan ranah kompetensi yang nanti akan dapat dijabarkan lebih lanjut kedalam kompetensi-kompetensi yang lebih spesifik.
- 4) Mengidentifikasi seperangkat kompetensi khusus dalam tiap kategori kompetensi umum, baik itu berujud skiil, pengetahuan, dan keterampilan tertentu.
- 5) Mengorganisir kompetensi-kompetensi tersebut dalam urutan atau struktur yang mermungkinkan untuk dijabarkan menjadi urutan belajar yag sesuai dengan prinsip psikologi belajar.
- 6) Menentukan tingkat kecakapan atau level off competence untuk masing-masing kompetensi sebagai acuan proses penilaian hasil belajar anak didik.

Keuntungan proses perencanaan kurikulum sekolah kejuruan dengan model Dacum ini adalah; biaya pengembangan yang relatif murah, waktu yang relatif singkat dengan hasil yang langsung dapat dipakai, dan peluang untuk menghasilkan kurikulum dengan relevansi tinggi dengan kebutuhan dunia kerja lebih besar.

#### **d. Pendekatan fungsional**

Penentuan isi kurikulum dilakukan dengan cara lebih obyektif. Pendekatan ini didasari oleh asumsi, bahwa anak didik yang belajar melalui PTK harus mempelajari fungsi-fungsi apa yang harus ada untuk menjamin kelangsungan kerja suatu industri atau dunia usaha tertentu dan kemudian dijabarkan menjadi penampilan (performance) yang terkait dengan fungsi atau tugas tertentu untuk dijadikan masukan bagi perencanaan kurikulum.

#### **e. Pendekatan analisis tugas ( job analisis )**

Pendekatan ini paling banyak diterapkan untuk PTK dinegara-negara yang sudah maju. Dengan pedoman dari hasil penelitian dan buku panduan yang dikembangkan selama beberapa tahun terakhir, sudah dapat dilakukan kajian secara sistematis tentang aspek-aspek perilaku dari persyaratan kerja tertentu yang dijabarkan langsung dari diskripsi pekerjaan dan diskripsi tugas. Dalam melakukan analisi tugas, perlu diperhatikan langkah-langkah atau urutan prosesnya. Menurut Finch dan Crun Killton ( 1979 ) mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan kajian literatur dan informasi yang relevan,
- 2) Mengembangkan inventori pekerjaan atau jabatan,
- 3) Memilih sample / contoh pekerja sebagai sumber data,
- 4) Melaksanakan survey atau penelitian dilapangan,
- 5) Menganalisis hasil survey untuk dijabarkan menjadi kurikulum dan



kegiatan belajar di sekolah.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Desentralisasi adalah pemberian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Karena desentralisasi merupakan kebijakan yang baru maka dalam implementasinya masih diperlukan arahan ataupun pedoman agar tujuan pendidikan dapat segera tercapai. Sebagai salah satu unsur pendidikan, kurikulum merupakan sejumlah kegiatan dan pengalaman belajar yang dialami oleh anak didik dibawah pengarahannya dan tanggungjawab sekolah, maka harus direncanakan dan dikembangkan secara cermat. Untuk itu terdapat beberapa alternatif penentuan isi kurikulum pendidikan teknologi kejuruan yakni menggunakan beberapa pendekatan seperti: pendekatan filosofis, pendekatan introspektif, pendekatan DACUM, pendekatan fungsional serta pendekatan job analisis).

### 2. Saran.

Kepada Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota hendaknya selalu memberi motivasi kepada sekolah agar selalu berusaha melakukan perencanaan dan pengembangan kurikulum serta mengalokasikan dana untuk menunjang kegiatan. Dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum hendaknya melalui tahap demi tahap yakni: melakukan kajian literature yang relevan, mengembangkan inventori pekerjaan atau jabatan, memilih pekerja sebagai sumber data, melakukan penelitian di lapangan dan menganalisis hasil survey. Kegiatan tersebut minimal harus melibatkan guru, komite sekolah, dunia usaha dunia industri.

## F. Sumber Bacaan

- Abu Duhou, Ibtisan. 2002. *School Based Management*. Logos. Jakarta
- Bambang Sartono. 2003. Pengenalan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Rangka Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup, *Semiloka Pengembangan Model Pembelajaran*, Lembaga Penelitian UNY. Agustus 2003.
- Budi Iswanto. 1999. *Otonomi Daerah*, implikasi Bagi Pengelolaan Pendidikan. Universitas Negeri Malang.
- Depdiknas. 2003. *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional & PP 61 tahun 1999*. Citra Umbara. Bandung.
- Finch, Curtis R., and Crunkilton, John R. ( 1979 ). *Curriculum development in Vocational and Technical Education Planning, Content, and Implementation*. Boston : Allyn and Bacon, Inc.
- Jalal, Fasli & Supriyadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita. Jakarta.

- Muchlas Samani. 1999. *School Based Management: Strategi Pemberdayaan Sekolah Dalam Kerangka Desentralisasi Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Berkualitas*. Universitas Negeri Malang.
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Slamet, dkk. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Buku 1: Konsep dan Pelaksanaan. Depdiknas, Ditjen Dikdasmen, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Jakarta.
- Sukanto, ( 1988 ). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, Depdikbud, Dirjendikti, P2LPTK. Jakarta.
- Miftah Thoha, 1999, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Visi Pendidikan Dalam Masyarakat Madani*.
- Bambang Sartono. 2003. Pengenalan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Rangka Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup, *Semiloka Pengembangan Model Pembelajaran* , Lembaga Penelitian UNY. Agustus 2003.
- Miftah Thoha, (1998) *Desentralisasi Pendidikan*, Balitbang Depdikbud, Jakarta.
- Slamet, PH. (2005), Pedomam Kapasitas Untuk Mendukung Desentralisasi Pendidikan Kejuruan. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R, (1994) *Manajemen Pendidikan Nasional*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Tilaar, H.A.R, (1999) *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Prospektif Abad 21*, Indonesia Tera, Magelang.
- Umaedi, (2000) *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta.
- \_\_\_\_\_,(2003) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.